

DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN DESA DI DESA KANCILAN KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA

(Analisi Implikasi Sosial dan Politik)

Oleh

Rajiv Windi Tristana

(14010113120013)

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Political dynasties can be interpreted as a power practice where family members (family Araceae) given or fixed in the sruktur power of Government so that power is only distributed among relatives, the family of blood. The village which is the smallest Government Unit also did not escape from the existence of a political dynasty. Therefore this research was conducted aiming to know political dynasty in the reign of village in Kancilan Village Kembang Subdistrict of Jepara District. In addition to knowing political dynasty, the study also to know the social and political implications of the existence of a political dynasty.

This research uses qualitative research methods, descriptive with documentation and interviewing as a technique of data collection. The subject in this study are purposif. The target in this research is the head of the village of Whistler that did political dynasty, privileged residents, community leaders, as well as communities in the Kancilan Village Kembang Subdistrict of Jepara District.

The results of this research show that there's actually a political dynasty in Kancilan Village Kembang Subdistrict of Jepara District for 26 years. The relationship of ruler and privileged residents greatly influences the length of this dynasty existed. Reciprocal relationships between rulers (patron) and society (the client) mutual benefit make this dynasty still exists today. But not always the political dynasty that detriment, itlooks in the village of Kancilan Village that still today families with Officials before. So many positive things that looks first at the village development program because the program always running and getting

better. Society tends to receive not even questioned about the political dynasty. Though many felt positive political dynasty, nonetheless there is a negative side that always beware.

Keywords: Political Dynasty, Patron-client, Implications.

1. PENDAHULUAN

Politik dinasti secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) diberi atau tetap didalam struktur kekuasaan pemerintahan sehingga kekuasaan itu hanya terdistribusi dikalangan kerabat, keluarga sedarah. Secara umum politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu pemerintahan. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun temurun atau dilakukannya salah satu keluarga atau kerabat dekat. Selain itu Dinasti politik juga dapat diartikan sebagai serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.

Pemilihan Kepala Desa, seperti hajatan demokrasi yang lain sebenarnya juga membuka jalan bagi pembaharuan desa. Hasil Pemilihan Kepala Desa, sesungguhnya jabatan politis yang kuat legitimasinya dan berdaulat. Dengan

kekuasaannya Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (Perdes) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (Nurcholis, 2011: 113).

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu). Untuk di Kabupaten Jepara sebutan Kepala Desa kerap di panggil dengan Petinggi, arti maksud Petinggi yaitu orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di desa maka dari itu Kepala Desa di Kabupaten jepara sering di sebut petinggi hal itu di tuangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Jepara”. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam persaingan dalam mencari pemimpin pada pemilihan Petinggi ini incumbent atau Petinggi sebelumnya akan berusaha keras agar estafet kepemimpinan di desa tersebut tetap didalam trah keluarganya, menjadi Petinggi

adalah sebuah hal kebanggaan tersendiri dalam masyarakat. Dengan sistem kepemimpinan desa yang hanya bisa berlangsung selama 2 periode masa jabatan Petinggi, sehingga persaingan elit dalam proses pemilihan petinggi ini terbuka peluang yang sama untuk berkopetensi dalam pemilihan Petinggi, Petinggi sebelumnya atau elit keluarga tidak akan melepas jabatan tersebut diluar trah keluarganya sehingga harus didistribusikan atau melingkar hanya kepada yang memiliki hubungan keluarga.

Fenomena dinasti kepala desa yang berdiri sejak masa Orde Baru dapat dibaca sebagai kemampuan kekuatan politik lama bertransformasi menyikapi perubahan-perubahan akibat peralihan rezim otoriter ke rezim demokratis. Artinya sustainabilitas dominasi kekuasaan mereka pada masa Orde Baru berhasil dipertahankan pada masa Reformasi.

Kemenangan kekuatan politik lama dalam setiap Pilkades memperlihatkan beberapa hal ; pertama, jaringan kekuasaan yang dimiliki elit lama yang terdiri dari anggota keluarga dan orang-orang dekat masih efektif digunakan untuk memenangkan kontestasi memperebutkan kekuasaan. Kedua, kekuatan elit lama semakin meluas dengan bergabungnya orang-orang dan organisasi-organisasi masyarakat yang berpotensi sebagai lawan politik, menjadi bagian dari jaringankekuasaannya. Ketiga, demokrasi yang dianggap memberikan kesempatan bagi elit lain untuk memegang jabatan politis, kenyataannya justru memperkuat hegemoni elit lama terhadap jabatan tersebut. Kalaupun ada elit baru yang mengisi jabatan-jabatan politik, namun mereka hanyalah bagian dari subordinasi

dari elit lama, sehingga kehadiran mereka malah memperkuat jaringan kekuasaan elit lama.

Kepala Desa pertama dari dinasti politik ini telah membangun sebuah jaringan kekuasaan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh generasi-generasi Kepala Desa berikutnya dari dinasti tersebut. Loyalitas para pendukung politik ini hadir bukan tanpa sebab, mereka punya alasan tersendiri untuk tetap mendukung Kepala Desa Kancilan. Ada hubungan baik yang terus dijaga oleh kepala Desa terhadap para pendukung politiknya, dengan memberikan berbagai keuntungan dalam bentuk materi maupun nonmateri. Sehingga orang-orang yang berada dalam jaringan kekuasaannya merasa berkepentingan untuk terus mendukung mereka mempertahankan jabatan kepala desa, untuk menjamin sustainability distribusi materi maupun nonmateri yang mereka terima.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe atau desain yang digunakan adalah tipe Deskriptif yakni merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang hal-hal tertentu. Tulisan ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan dan dengan data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Desa Kancilan, Pemerintah Kecamatan Kembang, Pemerintah Kabupaten Jepara, dan dari beberapa sumber lain yang relevan baik dari jurnal maupun media online. Proses wawancara dilakukan dengan Kepala desa, Mantan kepala desa periode sebelumnya, Warga desa yang pernah menjadi kandidat kepala desa dalam pilkades, Perangkat Desa Kancilan, Tim sukses calon, dan Tokoh masyarakat .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemilihan Petinggi di Desa Kancilan

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, Petinggi (Kepala Desa) merupakan figur pemimpin desa dimana seorang Petinggi itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang Petinggi dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Petinggi di Desa Kancilan yang dalam pemilihannya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pemilihan secara langsung melalui Pilkades ini juga merupakan salah satu ciri lain yang sering terjadi dalam pemerintahan yang demokratis. Adapula pendapat yang mengatakan terciptanya demokrasi juga akan tercapai apabila proses dari sebuah penyelenggaraan kepentingan umum dilaksanakan secara transparan. Inti dari kalimat di atas adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat mengetahui apa yang diputuskan, siapa yang memutuskan dan sejauh mana keputusan itu dilaksanakan dan perubahan apa yang didapatkan setelah keputusan itu ada.

Pembangunan nasional di dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan pembangunan secara keseluruhan sektor pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat Kelurahan maupun Desa. Pembangunan itu sendiri dimaksudkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang ada (Dahlan, 2000:11).

Setiap desa di Indonesia pasti akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan hal itu juga terjadi di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Di Kabupaten Jepara Kepala Desa lebih sering disebut Petinggi. Pemilihan Petinggi di Desa Kancilan tidak terlalu berbeda dengan pemilihan Petinggi lainnya di Kabupaten Jepara. Dalam pemilihan Petinggi pasti memiliki proses, adapun Proses pemilihan Petinggi di Desa kancilan yakni sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.
- b. Pendaftaran Pemilih oleh Panitia Pemilihan
- c. Pendaftaran dan seleksi bakal calon oleh Panitia Pemilihan tahapan kegiatannya
- d. Penetapan Calon Petinggi yang berhak ikut dalam pemilihan Kepala Desa dan pengumuman Calon
- e. Penetapan dan pengundian tanda gambar oleh Panitia Pemilihan
- f. Kampanye Calon Kepala Desa
- g. Pemungutan Suara
- h. Penghitungan Suara
- i. Penetapan Calon Terpilih
- j. Pelantikan Kepala Desa

Dinasti Politik di Desa Kancilan

Desa pada dasarnya merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Fenomena dinasti kepala desa yang berdiri sejak masa Orde Baru dapat dibaca sebagai kemampuan kekuatan politik lama bertransformasi menyikapi perubahan-perubahan akibat peralihan rezim otoriter ke rezim demokratis. Artinya sustainabilitas dominasi kekuasaan mereka pada masa Orde Baru berhasil dipertahankan pada masa Reformasi. Bila disimak dengan seksama Dinasti Politik di Desa Kancilan pasca tumbangny rezim Orde Baru, erat kaitannya dengan “kegagalan” rezim Reformasi dalam merestrukturisasi sistem politik, sosial dan ekonomi secara komprehensif. Perubahan struktur politik ditingkat nasional dan lokal tidak dibarengi dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi secara komprehensif sehingga masih banyak mengalami ketimpangan.

Dinasti politik di Desa Kancilan muncul karena sebagai orang nomer satu di Desa Kancilan dapat dan mampu mengontrol laju perekonomian. Selain itu posisi-posisi penting di desa mampu di tempati oleh orang-orang kepercayaanya bahkan keluarganya. Akan tetapi hal terpenting yang mendorong dinasti ini adalah kepercayaan bahwa menjadi kepala desa merupakan suatu kebanggan tersendiri yang mana keluarga tersebut bisa

menjadi penguasa. Kemenangan dinasti politik Desa Kancilan dalam setiap pergulatan politik pada dua rezim pemerintahan, disebabkan oleh sejumlah besar pendukung politik yang loyal terhadap mereka. Masing-masing generasi kepala desa dari dinasti politik ini mampu memelihara loyalitas pendukungnya, bahkan dari waktu ke waktu mereka mampu memperluas jumlah konstituennya. Artinya kepala desa pertama dari dinasti politik ini telah membangun sebuah jaringan kekuasaan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh generasi-generasi Petinggi berikutnya dari dinasti tersebut.

Loyalitas para pendukung politik ini hadir bukan tanpa sebab, mereka punya alasan tersendiri untuk tetap mendukung Dinasti Ini untuk memimpin Desa Kancilan. Ada hubungan baik yang terus dijaga oleh Dinasti ini terhadap para pendukung politiknya, dengan memberikan berbagai keuntungan dalam bentuk materi maupun nonmateri. Sehingga orang-orang yang berada dalam jaringan kekuasaannya merasa berkepentingan untuk terus mendukung mereka mempertahankan jabatan kepala desa, untuk menjamin sustainabilitas distribusi materi maupun nonmateri yang mereka terima. Selain itu pula pembangunan yang saling berkelanjutan membuat masyarakat menjadi lebih bisa menerima akan dinasti politik ini.

Implikasi Sosial dan Politik Adanya Dinasti Politik di Desa Kancilan

Demokratisasi lokal adalah sebuah keniscayaan di era Otonomi Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tolak ukur kemajuan demokrasi suatu negara. Namun, dibalik tujuan mulia tersebut tersirat kondisi

yang justru sebaliknya, oligarki, musuh demokrasi. Politik dinasti tidak bisa dilarang, karena menyangkut hak asasi setiap orang untuk menjadi pemimpin dan sebagai ekspresi demokrasi. Meski demikian, melanggengkan politik dengan memajukan istri, anak, saudara, atau kerabat menggantikan kedudukannya sebagai pejabat publik berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Dinasti politik di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sudah ada kurang lebih 26 tahun. Sadar atau tidak masyarakat desa kancilan pasti akan menerima dampak dari adanya dinasti politik ini. Dan diketahui pula bahwasanya dinasti politik itu tidak selamanya akan merugikan. Pasti ada hal positif dari adanya dinasti politik yang akan di rasakan oleh masyarakat. Implikasi adanya dinasti politik yang dirasakan masyarakat Desa Kancilan bisa berupa dari segi sosial bahkan politik.

A. Implikasi Sosial Dinasti Politik di Desa Kancilan

Implikasi sosial yakni Pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial. Secara sosial kehidupan di desa sering dinilai sebagai kehidupan yang tenteram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang dapat menimbulkan konflik. Perlu dipahami bahwa tidak semua masyarakat desa dapat kita sebut sebagai masyarakat tradisional, sebab ada desa yang sedang mengalami perubahan ke arah kemajuan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama.

Implikasi Sosial Dinasti Politik di Desa Kancilan

Positif	Negative
<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan desa dan sektor pertanian semakin maju• Mudahnya pemerintah desa berkomunikasi dengan elit untuk memajukan desa• Dinasti politik menciptakan masyarakat yang aktif dalam mengawasi	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya inovasi program yang diterima masyarakat• Adanya kubu-kubu di desa• Elit Desa selalu diuntungkan

B. Implikasi Politik Dinasti Politik di Desa Kancilan

Politik selalu berkaitan erat dengan pemerintahan, artinya setiap aparatur negara terpilih melalui proses politik, maka dengan keadaan politik terjadi cukup menentukan bagaimana keadaan pengaruh yang ditimbulkan. Implikasi dalam dinasti politik di desa kancilan pasti pula ada sisi positif dan pula ada sisi negatif yang di hasilkan. Berikut adalah implikasi politik yang di hasilkan karena adanya dinasti politik.

Implikasi Politik Dinasti Politik di Desa Kancilan

Positif	Negative
<ul style="list-style-type: none">• Figur yang akan berkompetisi sudah di kenal masyarakat• Lebih mudah mengkoordinasikan tugas ke perangkat desa• Calon dari dinasti politik sudah memiliki modal politik dari keluarga• Sudah memiliki rekam jejak politik yang panjang sesuai dengan perjalanan keluarganya	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya kesempatan masyarakat untuk ikut berkompetisi• Penempatan posisi perangkat desa tidak sesuai keahlian

4. KESIMPULAN

1. Dinasti politik memang terjadi di Desa Kancilan hal ini terlihat dari proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Selain itu kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat.
2. Eksistensi Politik Dinasti Desa Kancilan disebabkan karena kemampuannya mereproduksi basis sumber daya patronase yang melalui jaringan klientelistik menjadi dukungan politik yang masif dan

berkelanjutan. Legitimasi kekuasaannya diperoleh karena kemampuan menjaga soliditas keluarga inti (elit dinasti) dan sumber daya patronase terutama sumber daya ekonomi yang sangat kuat menopangnya. Hal tersebut dibarengi dengan kemampuan memelihara soliditas eksternal (di luar elit dinasti) yang di identifikasikan sebagai jaringan klientelistik yang tidak pernah melapuk, bahkan cenderung menguat. Dinasti politik di Desa Kancilan adalah sumber daya patronase (elit desa) sengaja dirancang untuk memperoleh dukungan suara jauh sebelum adanya Pilkades baik dengan cara saling menjalin pertemanan dengan baik maka akan timbul rasa saling membantu. Artinya, elektabilitas dinasti politik di Desa Kancilan tidak diperoleh secara instan melalui pertukaran-pertukaran sumber daya patronase dengan suara para pemilih setiap menjelang Pilkades.

3. Dinasti politik di Desa Kancilan cenderung tidak seluruhnya merugikan, ada hal positif dari adanya dinasti politik yang akan di rasakan oleh masyarakat. Implikasi adanya dinasti politik yang dirasakan masyarakat Desa Kancilan bisa berupa dari segi sosial bahkan politik. Ada beberapa hal negatif dalam dinasti ini akan tetapi cenderung banyak hal positif yang di dapat masyarakat membuat dinasti ini semakin bertahan hingga sekarang.

Daftar pustakan

Buku dan Jurnal:

- Budiarjho, Miriam dkk, *Dasar-dasar ilmu politik*, gamedia pustaka utama, jakarta
- Christian Chua, “Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist: Indonesia’s Conglomerates between Authoritarianism and Democracy” dalam Marco Bunte and Andreas Ufen (ed). *Democratization in Post-Soeharto Indonesia*. 2009. p. 201-225.
- Djati, Wasisto Raharjo. 2013. “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal.” *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, vol.18, No.2, Juli 2013: 203-231 <http://www.lapsosio.org>
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia ; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan ; Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, LP3ES : Jakarta.
- Itoh, Mayumi. 2003. *The Hatoyama Dynasty ; Japanese Political Leadership Through The Generations*, New York : Palgrave Macmillan™.
- Komar, Samsul “Survivabilitas Dinasti Kepala Desa di Desa Puputan Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka tengah” *Tesis Progam Paskasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2013
- Mas’oed, Mohtar. 2003. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Michael Ford dan Thomas B Pepinsky, “Melampaui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia”, *Prisma*, Vol. 33 No. 1 Tahun 2014.
- Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Ngabiyanto dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: RumahIndonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Nyoman Dantes. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pelras, Christian. 1981. "Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan." *Makalah yang disajikan pada Konferensi Sulawesi Selatan Pertama di Monash University, Melbourne, Australia*

_____. 2006. *Manusia Bugis*, Jakarta : Nalar.

Priyanto, Hadi. 2006. *Wong cilik di Panggung Birokrasi Lokal*, Kota Jepara

Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2007. *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta : Keppel Press.

Richard Robison and Vedi R Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*, London and New York: Routledge, 2004.

Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Scott, James C. 1972a. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1, pp. 91-113. Diakses tanggal 23 Maret 2016, dari <http://www.jstor.org/stable/1959280>.

_____. 1972b. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia." *The Journal of Asian Studies*, Vol. 32, No. 1, pp. 5-37. Diakses tanggal 28 Maret 2016, dari <http://www.jstor.org/stable/2053176>.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharni dkk. 1992. *Pesta Demokrasi di Pedesaan*, Yogyakarta: Aditya Media.

Sutoro, Eko. 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta : APMD Press.

Wantchekon, Leonard. 2003. "Clientelism and Voting Behavior : Evidence from a Field Experiment in Benin." *World Politics*, Vol. 55, No. 3, pp. 399-422. Diakses tanggal 2 April 2016, dari <http://muse.jhu.edu/journals/wp/summary/v055/55.3wantchekon.html>.

Winters, Jeffrey A. *Oligarki terj.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.

Laporan:

BAPPEDA dan BPS. 2015. Jepara Dalam Angka, Kabupaten Jepara

Kecamatan Kembang. 2015. Kecamatan Kembang Dalam Angka. Kabupaten Jepara

Internet:

https://www.academia.edu/6022670/Dinasti_politik

<http://www.beritametro.co.id/opini/dinasti-politik-di-indonesia>

<https://etnobudaya.net/2008/07/31/hubungan-patron-klien/>

<https://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi-politik-indonesia-kontemporer/>

<http://www.gresnews.com/berita/politik/173086-rantai-kekuasaan-oligarki-masih-jadi-budaya-politik-di-indonesia/0/>

<http://bawaslu-babelprov.go.id/index.php/artikel/item/1631-kekuasaan-dinasti-politik>